



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR **43** TAHUN **2025**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Kudus, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu mengatur koordinasi rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025-2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

BAB II

RAD-SPM

Pasal 2

- (1) Dalam Penerapan SPM Perangkat Daerah berpedoman pada RAD-SPM.

- (2) Substansi dalam RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jenis layanan;
 - b. mutu layanan;
 - c. anggaran;
 - d. inisiasi;
 - e. sumber dana; dan
 - f. instansi pelaksana.

Pasal 3

- (1) RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah;
 - c. BAB III : Analisis Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan SPM;
 - d. BAB IV : Kebijakan Nasional Pencapaian SPM;
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM; dan
 - f. BAB VI : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

- (2) Ketentuan mengenai dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **13 Oktober 2025**

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **14 Oktober 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN **2025** NOMOR **43**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan hak atas Pelayanan Dasar sesuai dengan jenis dan mutu layanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya adalah pemenuhan Pelayanan Dasar kepada masyarakat. Bentuk Pelayanan Dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah selanjutnya diberikan batasan-batasan minimal khusus melalui Standar Pelayanan Minimal, yaitu mengatur jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan SPM sangat penting untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan Pelayanan Dasar serta menyediakan alokasi anggaran yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar minimal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Urusan yang dimaksud meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Pemerintah Kabupaten Kudus menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga dapat memberikan pedoman dalam upaya pemenuhan layanan SPM kepada masyarakat. Rencana aksi daerah tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan supaya dapat diimplementasikan, diterapkan, dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dengan demikian, RAD-SPM memiliki posisi strategis untuk menjaga efektivitas upaya pemenuhan layanan SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan menjaga keselarasan dengan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Handwritten signature or mark

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Kegiatan penyusunan RAD-SPM Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang 52);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); dan
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan penyusunan RAD-SPM Kabupaten Kudus ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan RAD-SPM Kabupaten Kudus yakni:

- a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana Program dan Kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah administrasi Kabupaten Kudus. Adapun lingkup Kegiatan penyusunan RAD-SPM Kabupaten Kudus meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan Pelayanan Dasar pada 6 (enam) urusan wajib;
- b. identifikasi program kegiatan dan besaran anggaran yang mendukung pencapaian SPM;
- c. melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib;
- d. melakukan analisis kemampuan anggaran Daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
- e. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
- f. merumuskan strategi, kebijakan, Program/Kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif, pengalokasian anggaran, dan target capaian dalam mendukung pemenuhan SPM; dan
- g. menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

1.5. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sistematika laporan penyusunan RAD-SPM Kabupaten Kudus meliputi:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika laporan.

2. Bab 2 Kondisi Umum Daerah

Pada bab 2 memberikan penjabaran tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Bab 3 Analisis Kebutuhan Pemenuhan SPM

Pada bab 3 ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.

4. Bab 4 Kebijakan Nasional Penerapan SPM

Pada bab 4 ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.

5. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM

Pada bab 5 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam Kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.

6. Bab 6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan

Pada bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7. Bab 7 Penutup

Pada bab 7 ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar Pelayanan Dasar.

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian utara dengan luas sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar. Secara administratif dan letak wilayah, berikut merupakan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan kabupaten Jepara.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus kurang lebih 44.744 (empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektar. Secara lebih rinci, pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus

No	Kecamatan		Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Desa/ Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
	Kode	Nama				
1	33.19.01	KALIWUNGU	3.419,01	7,64	15	Kedungdowo
2	33.19.02	KOTA KUDUS	1.141,50	2,55	25 (16 Ds, 9 Kel)	Purwosari
3	33.19.03	JATI	2.732,57	6,11	14	Tanjungkarang
4	33.19.04	UNDAAN	7.456,67	16,66	16	Undaan Kidul
5	33.19.05	MEJOBBO	3.736,65	8,35	11	Jepang
6	33.19.06	JEKULO	8.710,76	19,47	12	Klaling
7	33.19.07	BAE	2.406,56	5,38	10	Bae
8	33.19.08	GEBOG	6.038,18	13,49	11	Gondosari
9	33.19.09	DAWE	9.102,59	20,34	18	Piji
Jumlah			44.744,50	100	132	

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042

Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria.

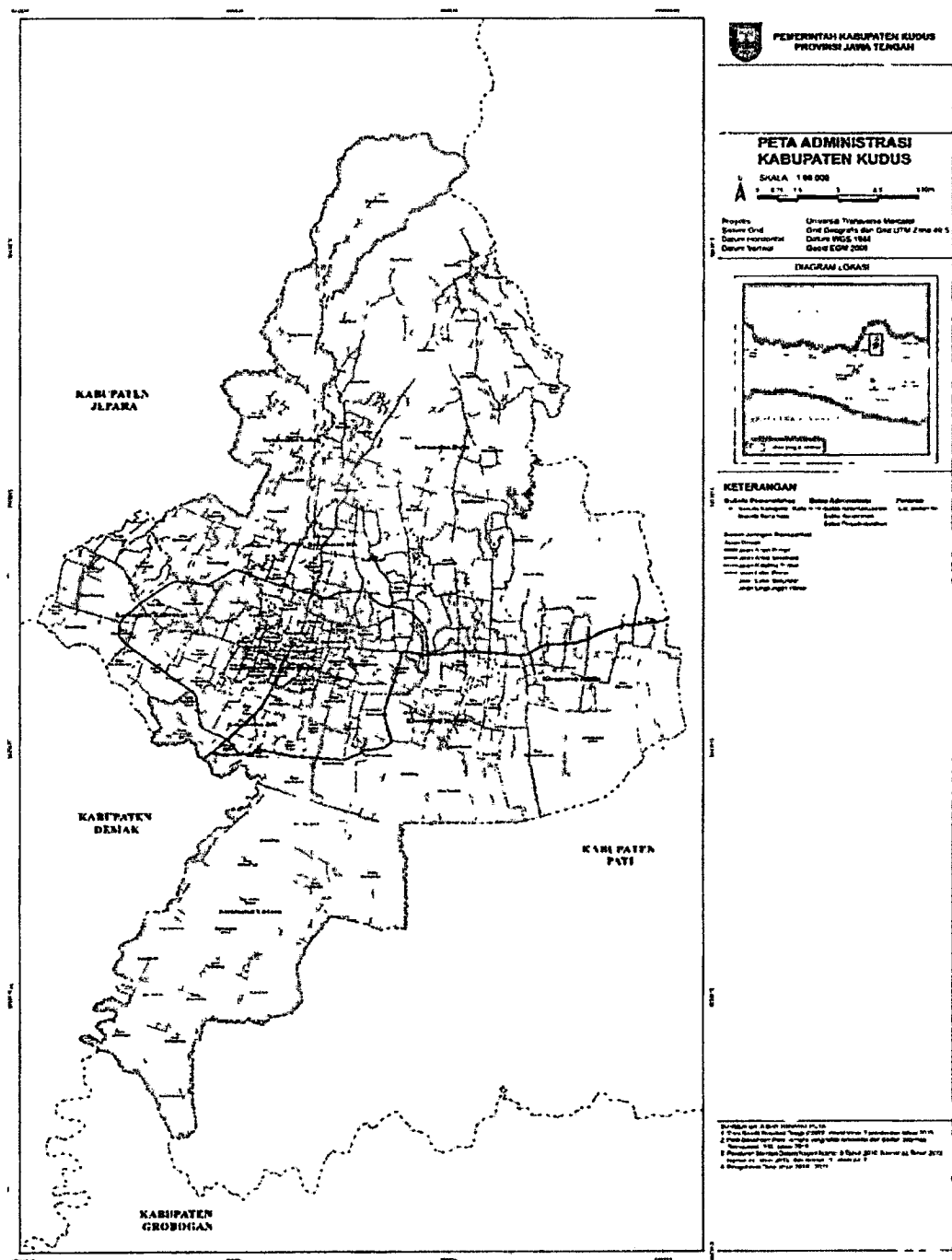
b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan serta 110°45'30" dan 110°58'37" Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di

persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan adalah 22 km.

Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan lokal provinsi dan nasional.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042

Handwritten signature/initials

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Kudus berada pada ketinggian antara 5 hingga 1.600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayah yang memiliki ketinggian terendah atau 5 mdpl berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Dawe dengan kondisi wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 1600 mdpl.

Ketinggian wilayah yang bervariasi disebabkan oleh kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Kudus, sehingga terdapat karakteristik resiko bencana relatif berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.

d. Hidrologi

Ketersediaan air baku di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari kondisi air permukaan maupun air tanah yang tersedia. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering atau mengalir namun dengan debit sangat kecil. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai khususnya yang berada di daerah perbukitan berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.

Terdapat 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kudus yaitu Kali Wulan dan Kali Juana. Kali Juana menampung aliran drainase dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan *polder* maupun *long storage* yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir. Sungai yang mengalir sepanjang tahun salah satunya adalah Kali Serang, di mana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratun Seluna untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih, dan tenaga listrik. Kabupaten Kudus termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana).

**Tabel 2.2. Pencatatan Debit Bendungan Pengambilan/
Pencatatan Debit Sungai**

No	Nama Sungai	Nama Bendung	Daerah Irigasi	Total Luas Sawah (Ha)	Debit Sungai	Rata-2
1	Dawe	Bantenan	Mejobo dan Golan	63	389	26
2	Piji	Ingas	Ingas	2613	39.964	2664

No	Nama Sungai	Nama Bendung	Daerah Irigasi	Total Luas Sawah (Ha)	Debit Sungai	Rata-2
3	Gelis	Karangayam	Karangayam	482,5	2985	199
4	Piji	Kauman	Kauman	215	2289	153
5	Jaro	Sembojo	Sembojo	147	1144	76
6	Gelis	Beru	Beru	141	915	61
7	Gelis	Suru	Suru	201	855	57
8	Gelis	Kedunggupit	Kedunggupit	931	3189	213

Sumber: Dinas PUPR Laporan Periode September 2023, (data diolah)

e. Klimatologi

Kondisi klimatologi di wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui beberapa cara, antara lain dari curah hujan, suhu udara, dan kelembaban. Curah hujan yang di wilayah Kudus berkisar antara 2.000–3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500–5.000 mm/tahun. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban rata-rata 73.83% hingga 79.00%. Angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum dapat mencapai 50 km/jam. Sedang gelombang dari arah barat, dengan tinggi minimum 1 (satu) meter dan maksimum 5 (lima) meter.

f. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadi bencana alam. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, wilayah Kabupaten Kudus memiliki 3 kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana tektonik, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gerakan tanah. Berikut merupakan wilayah dengan potensi kebencanaan yang tersebar di Kabupaten Kudus:

1. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan, dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.
2. Kawasan rawan bencana tektonik di Kecamatan Undaan.
3. Kawasan rawan tanah longsor di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi Kecamatan Dawe, Desa Soco Kecamatan Dawe, Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Cranggang Kecamatan Dawe, dan Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe.
4. Kawasan rawan gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Dawe.

Guna mengantisipasi apabila terjadi bencana, diupayakan melalui Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi :

1. Jalur Evakuasi Bencana.

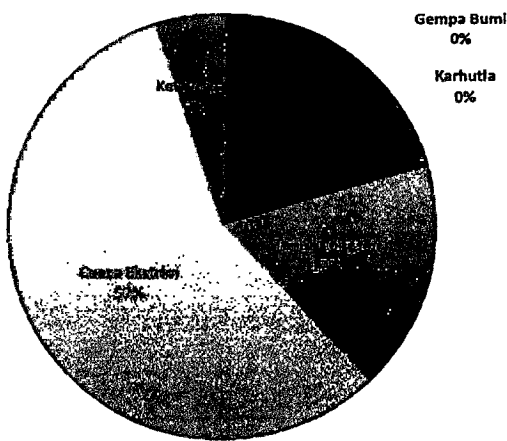
Jalur evakuasi bencana meliputi Kecamatan: Gebog, Dawe dan Jekulo.

2. Tempat Evakuasi Bencana.

Tempat evakuasi bencana meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo. Tempat evakuasi bencana berupa ruang terbuka meliputi lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan sarpras lainnya.

Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan, jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2 Persentase Jumlah Kejadian Bencana



Sumber : BPBD Kabupaten Kudus

g. Demografi

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebanyak 436.585 orang atau 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 atau sekitar 50,01%. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk sebanyak 877.821 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 438.626 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 439.195 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki.

Apot

**Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus
Tahun 2021-2024 (Jiwa)**

Tahun	Laki – laki		Perempuan		JUMLAH
	Orang	%	Orang	%	
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431
2024	438.626	49,97	439.195	50,03	877.821

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebanyak 436.585 orang atau 49,99% dan perempuan sebanyak 436.846 atau sekitar 50,01%. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk sebanyak 877.821 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 438.626 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 439.195 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki.

**Tabel 2.4. Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio*
di Kabupaten Kudus Tahun 2024**

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15
2024	186.406	621.783	69.632	877.821	41,18

Diolah dari: DKB semester 2 tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 41,18.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

Tingkat pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Sekolah	215.520	225.946	235.344	242.423	246.338
Belum Tamat SD/ Sederajat	64.338	62.373	59.661	57.637	55.276
Tamat SD/sederajat	236.051	229.125	219.953	214.236	208.611
SLTP/sederajat	146.140	144.005	140.876	139.680	139.283
SLTA/sederajat	157.367	157.921	161.995	167.016	173.288
Akademi / Sarjana	46.553	47.835	50.250	52.439	55.025
Jumlah Penduduk	865.969	867.205	868.079	873.431	877.821

Sumber : DKB semester 2 Tahun 2024 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 2.5. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 246.338 penduduk. Jumlah penduduk yang SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana mengalami peningkatan 2.586 orang atau naik 4,49 % dibandingkan tahun 2023.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah. Secara lebih detail, indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Tabel 2.6. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut



Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.798,56	3.004,04	3.004,04
b.	Pertambangan dan Penggalian	175.02	181.28	181.28
c.	Industri Pengolahan	90.085,50	94.738,74	94.738,74
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	51.79	54.16	54.16
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.73	25.29	25.29
f.	Konstruksi	4.271,82	4.416,06	4.416,06
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.498,74	7.104,74	7.104,74
h.	Transportasi dan Pergudangan	1.753,94	2.090,15	2.090,15
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.591,94	1.773,49	1.773,49
j.	Informasi dan Komunikasi	966.68	1.098,57	1.098,57
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.313,59	2.428,75	2.428,75
l.	Real Estate	649.89	721.90	721.90
m.	Jasa Perusahaan	146.43	162.97	162.97
n.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	884.48	943.40	943.40
o.	Jasa Pendidikan	1.273,91	1.392,22	1.392,22
p.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408.60	449.44	449.44
q.	Jasa Lainnya	670.29	725.25	725.25
	P D R B	114.564,91	121.310,45	121.310,45

Nilai PDRB Kabupaten Kudus dihitung dari hasil akumulasi nilai produksi bruto dari 17 sektor lapangan usaha. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dipengaruhi oleh faktor inti berupa produksi dan pemasaran produk di masing-masing sektor ekonomi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus secara umum pada tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami peningkatan, nilai tertinggi tercapai pada tahun 2023 sebesar 121.310,45 milyar rupiah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen nilai PDRB tahun sebelumnya. Kenaikan nilai PDRB menurut harga berlaku menggambarkan bahwa nilai nominal output atas aktivitas ekonomi masyarakat mengalami kenaikan.

Distribusi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha menunjukkan peningkatan riil perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Ditinjau dari

kontribusi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama sebagai pemberi andil terbesar dalam Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 dengan nilai kontribusi sebesar 78,10 persen turun dibanding tahun 2022 (78,60 persen). Lapangan usaha yang menduduki kontributor utama selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,86 persen, konstruksi 6,64 persen dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,48 persen. Perubahan distribusi PDRB menurut lapangan usaha memberikan gambaran lapangan usaha yang menjadi unggulan pembangunan ekonomi daerah dan menjadi lapangan mata pencarian utama masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.

b. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

**Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus
ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2022–2024**

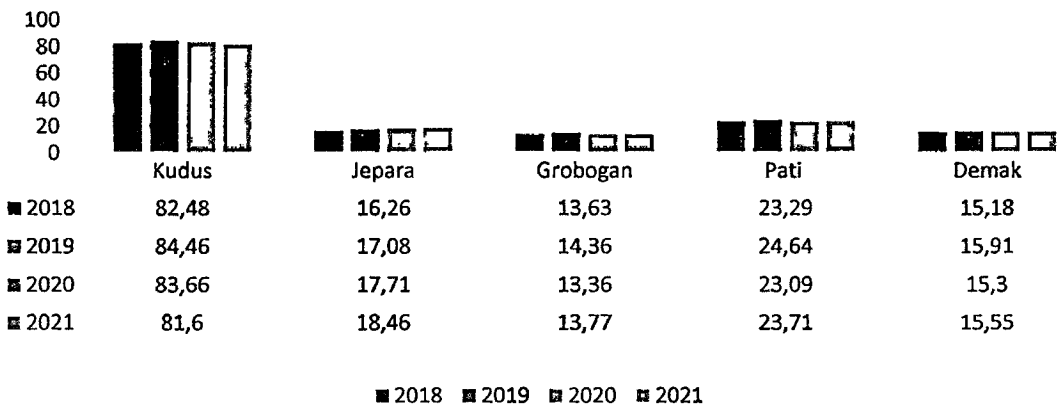
No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
a.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	1.32	1.32
b.	Pertambangan dan Penggalian	-2.52	0.71	0.71
c.	Industri Pengolahan	0.85	1.24	1.24
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.42	2.75	2.75
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.11	5.52	5.52
f.	Konstruksi	2.97	3.04	3.04
g.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.61	5.09	5.09
h.	Transportasi dan Pergudangan	61.14	8.62	8.62
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.18	10.07	10.07
j.	Informasi dan Komunikasi	2.07	13.33	13.33
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.56	0.84	0.84
l.	Real Estate	2.92	8.62	8.62
m.	Jasa Perusahaan	5.7	6.91	6.91

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
n.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.38	5.53	5.53
o.	Jasa Pendidikan	1.2	6.53	6.53
p.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.01	8.58	8.58
q.	Jasa Lainnya	9.44	3.94	3.94
	P D R B	2.21	2.19	2.19

c. PDRB per Kapita

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Grafik 2. 1. PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitarnya Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar 2018-2022

PDRB per Kapita Kabupaten Kudus masuk ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Grobogan, Pati, dan Demak. Meskipun demikian, PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus menunjukan tren yang menurun selama tahun 2018-2021. PDRB per kapita sempat mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020, namun kembali menurun sebesar 2,06 juta rupiah pada tahun 2021. PDRB per kapita dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Penurunan PDRB per kapita dipengaruhi oleh faktor indikatif seperti menurunnya pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi unggulan dan potensial daerah.

[Handwritten signature]

2.3. Aspek Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

Analisis mengenai kondisi layanan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menelaah capaian indikator pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Tabel 2.8. Penerapan SPM dan Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2022-2024

No	Bidang / Urusan	Capaian Penerapan			Persentase Realisasi Anggaran		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pendidikan	82,00	90,18	84,50	91.93	94,73	96,47
2	Kesehatan	84,00	99,40	99,15	75.94	94,15	91,46
3	Pekerjaan Umum	99,00	92,20	100	78.58	97,64	95,78
4	Perumahan dan Perkim	100.00	100	100	100.00	99.96	83,07
5	Trantibum	97,00	100	99,30	99.71	89,99	94,14
6	Sosial	99,00	100	100	90.17	83,76	74,70
	Kabupaten Kudus	93,50	96,96	97,16			

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (data diolah)

Permasalahan penerapan SPM di Kabupaten Kudus selain adanya perubahan regulasi yang sangat cepat juga disebabkan kurangnya sinergi perencanaan dan penganggaran pada internal Perangkat Daerah. Meskipun demikian penerapan SPM di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 93,50 di tahun 2022 menjadi 97,16 di tahun 2024. Bahwa keberhasilan pencapaian target ini diperlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparaturnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kabupaten Kudus. Target SPM harus diupayakan peningkatan dan dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB III

ANALISIS KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM

3.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Secara umum indeks capaian SPM Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 adalah 97,16 %, masuk kategori **Tuntas Utama**. Capaian tersebut terdiri atas:

- Bidang Pendidikan : 84,50 %
- Bidang Kesehatan : 99,15 %
- Bidang Pekerjaan Umum : 100 %
- Bidang Perumahan Rakyat: 100%
- Bidang Trantibum Linmas : 99,30 %, dan
- Bidang Sosial : 100 %.

Adapun secara rinci capaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel 3.1.1. Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) Tahun Sampai Dengan 6 (Enam) Tahun Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 18 (Delapan Belas) Tahun Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
KUDUS	26.804	25.730	95,99%	126 373	125.475	99,29 %	2.858	1.873	65,54%	164.448.628.927	158.639.475.568

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kudus Tahun 2024

3.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 3.1.2. Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan											
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KUDUS	14.811	14.811	100 %	14.138	14.138	100 %	12.213	12.101	99,08 %	48.809	46.824	95,93 %

[Handwritten signature]

SPM Bidang Kesehatan											
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
126.115	126.115	100 %	573.808	571.607	99,62 %	97.968	94.030	95,98 %	232.426	231.826	99,74 %

Spm Bidang Kesehatan												Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaia n (%)		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	36	37	38	39
18.033	18.008	99,86%	2.182	2.166	99,27 %	12.867	18.843	100 %	16.547	16.547	100 %	6.849.660.400	6.264.366.633

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kudus Tahun 2024

Handwritten signature/initials

3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3.1.3. Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KUDUS	6.408	6.408	100 %	2.216	2.216	100%	7.122.479.000	6.954.073.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kudus Tahun 2024

3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3.1.4. Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam			Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KUDUS	972	972	100 %	12	21	100%	40.000.000	40.000.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kudus Tahun 2024

[Handwritten signature]

3.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.1.5. Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Trantibum Linmas								
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KUDUS	212	212	100 %	59.174	59.174	100 %	59.174	59.174	100 %

SPM Bidang Trantibum Linmas						Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran				
Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
11	12	13	14	15	16	17	18
59.174	59.174	100 %	19	19	100 %	12.192.514.435	11.477.976.621

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Kudus Tahun 2024

3.1.6. Bidang Sosial

Tabel 3.1.6. Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Sosial								
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KUDUS	565	565	100 %	85	85	100 %	368	368	100 %

SPM Bidang Sosial						Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			Linjamsos Pada Saat Tanggap dan Setelah Bencana Bagi Korban Bencana				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian (%)		
11	12	13	14	15	16	17	18
82	82	100 %	7.022	7.022	100 %	564.174.800	371.543.065

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Kudus Tahun 2024

[Handwritten signature]

3.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

3.2.1. Permasalahan Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM urusan pendidikan, terdapat kendala permasalahan yakni:

- a. pada tahap pengumpulan data, rilis data jumlah penduduk usia dari dukcapil seringkali terlambat dari pengisian SPM;
- b. pada tahap penghitungan kebutuhan, hasil perhitungan kebutuhan guru SD, SMP, dan PAUD belum memenuhi kebutuhan serta kurangnya Guru TK yang memenuhi syarat untuk rekrutmen pengawas;
- c. tidak adanya guru ASN pada PKBM swasta pada tingkat pendidikan kesetaraan, sehingga capaian mutu kesetaraan pada bidang tersebut dinyatakan kosong;
- d. pada tahap pelaksanaan SPM, terdapat kendala yakni rendahnya kemampuan numerasi siswa dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman siswa terhadap penerapan materi matematika; dan
- e. minat pendidik Guru TK untuk mengikuti seleksi Guru Penggerak masih rendah, hal ini dikarenakan banyak Guru TK yang berstatus non ASN. Sedangkan Guru yang berstatus ASN sebagian besar mendekati usia pensiun.

3.2.2. Permasalahan Bidang Kesehatan

Beberapa kendala permasalahan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan layanan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kudus, antara lain:

- a. masih terdapat kematian neonatal 0-28 hari yang belum mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
- b. terdapat bayi yang lahir di akhir bulan desember sehingga belum tercatat dalam pelayanan bayi sesuai standar;
- c. masih sedikitnya balita yang ditimbang di posyandu hingga belum mendapat pelayanan balita sesuai standar KPUP;
- d. kurangnya kader dan perubahan dari posbindu ke posyandu;
- e. tidak semua lansia datang ke posyandu dan puskesmas sehingga tidak bisa dilakukan skrining;
- f. kurangnya kader dan perubahan dari posbindu ke posyandu; dan
- g. pada pelayanan orang dengan gangguan jiwa, perubahan kenaikan target dan adanya penurunan kunjungan kesehatan jiwa di puskesmas juga sangat mempengaruhi capaian penerapan SPM urusan kesehatan.

3.2.3. Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum terdapat kendala permasalahan diantaranya adalah kurangnya jumlah anggaran dan personil dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, termasuk terbatasnya anggaran pendampingan

untuk Kegiatan infrastruktur berbasis Masyarakat, penyediaan air minum, dan sanitasi berbasis masyarakat.

3.2.4. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM urusan perumahan dan kawasan permukiman terdapat permasalahan diantaranya dalam proses usulan perbaikan rumah tidak layak huni, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni:

- a. pada tahap verifikasi dan validasi, terdapat data calon penerima yang sudah meninggal dunia dan/atau kondisi rumah sudah diperbaiki oleh pemiliknya sehingga menjadi rumah layak huni; dan
- b. dalam pelaksanaan penyusunan identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman terkendala keterbatasan ketersediaan data di desa.

3.2.5. Permasalahan Bidang Trantibum Linmas

Permasalahan yang menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan SPM urusan trantibum linmas yakni:

- a. kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin, dimana diantaranya berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat sehingga perlu koordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan pendataan;
- b. KRB belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang dan biaya untuk pengentasan bencana; dan
- c. untuk mencapai target, SPM *Time Response* Damkar 15 menit, namun sarana dan prasarana serta lokasi posko Damkar belum memadai sepenuhnya.

3.2.6. Permasalahan Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus selaku pengampu penerapan SPM urusan sosial adalah:

- a. pada tahap pengumpulan data, ketersediaan data tidak memadai karena data sosial bersifat dinamis, nomaden, mobilitas tinggi, dan koordinasi lemah;
- b. pada tahap penghitungan, terdapat ketidaksesuaian antara rincian belanja di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan rincian Kegiatan yang harus dipenuhi di dalam <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> ; dan
- c. alokasi belanja wajib Pelayanan Dasar urusan sosial belum memadai dengan tuntutan pelayanan di bidang sosial.

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

4.1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua, membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga, menetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan tersebut berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah.

4.2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menerjemahkan SPM. Secara umum,

peraturan pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM. Adapun jenis SPM termasuk materi muatannya terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, serta pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggung jawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma dimana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

4.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penerapan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan penerima Pelayanan Dasar. Standar Pelayanan Minimal berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota yakni:

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM urusan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak

- bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - d. masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan

daerah provinsi dan peraturan kepala daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;

- b. terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d. menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- d. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. penyandang disabilitas terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti;
- b. anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan di luar panti;
- b. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- c. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- d. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan Mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat

dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh:

- a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. kondisi bencana; dan
- d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi warga negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di Daerah, Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten Kudus, terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Bupati Kudus
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus
- c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Kudus
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus
- c. Anggota : Inspektur, Kepala BPPKAD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PKPLH, Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Satpol PP dan Kepala Pelaksana BPBD.

Tim Penerapan SPM Kabupaten Kudus mempunyai tugas meliputi:

- a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi

- terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
 - m. melaporkan penerapan SPM kepada Sekretariat Tim Penerapan SPM melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi setiap triwulan.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan pemenuhan SPM akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM belum terpenuhi.

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan SPM di Daerah, pemerintah melalui pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun, secara tegas menjelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di Daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani antara lain:

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan;

- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
- d. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota; dan
 - 3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus telah diupayakan berbagai strategi dan kebijakan untuk optimalisasi capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan pemenuhan SPM akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM belum terpenuhi.

5.1. Strategi dan Kebijakan rencana Aksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mengatur dan menuangkan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal.

Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Kudus urusan pendidikan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

RENCANA AKSI DAERAH PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029 PER URUSAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			SATUAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
	11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
	12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
	14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik
	16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
	17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik
	18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
	21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
	22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
	23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
	25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
	26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang
	27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
	33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
	36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
	37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
	38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
	41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidika

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN
	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
	5	Pembangunan Laboratorium	Ruang
	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
	8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
	22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
	23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
	24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik
	26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket
	27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik
	29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
	30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
	31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
	32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan
	33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN
	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang
	36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
	37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang
	38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
	44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
	46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
	48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
	50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
	51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
	52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit
	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
	4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket
	5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket
	6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket
	7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik
	10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN
	13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
	15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
	16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang
	17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
	23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
	24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
	25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
	27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik
	29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
	31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
	33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
	34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
	35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
	36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
	7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Orang
	9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Unit
	10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang
	11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
	12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
	13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
	14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
	15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
	16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
	17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
	18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang
	19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
	20	Penataan Ruang/ Sudut Baca	Ruang
	21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik
	22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
	23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
	24	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang
	25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
	26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
	27	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
	29	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium	Ruang
	30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
	31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
	32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik
	33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
	34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
	36	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit

2. URUSAN KESEHATAN

No	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
2.	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
3.	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2.	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga

4. URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		SATUAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
	2	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah

5. URUSAN TRANTIBUM LINMAS

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen
2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen
7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang
9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang
11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang
12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang
13	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus
14	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan
15	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan
16	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus
17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit
	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen
	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan
	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang
	JUMLAH INDIKATOR		
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan
	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen
	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit
	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan
	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen
	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen
	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga
	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota	Laporan
	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD)	Unit
	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan
	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen
	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen
	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD)	Unit
	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran	
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		SATUAN
	3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit

6. URUSAN SOSIAL

No	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		SATUAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	1	Penyediaan permakanan	Orang
	2	Penyediaan sandang	Orang
	3	Penyediaan alat bantu	Orang
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	1	Penyediaan makanan	Orang
	2	Penyediaan sandang	Orang
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang

5.2. Rencana Aksi Daerah dalam Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kudus telah merumuskan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2025-2029. Adapun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut ini:

5.2.1. Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	warga negara	26.804	27.282	27.282			23.413.460.000	-	APBD	Disdikpora	27.282	27.282			23.553.809.800	-	APBD	Disdikpora
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	100			81	81							81	81				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	100			92	92							92	92				
2	Pendidikan Dasar	warga negara	126.373	126.906	126.906			73.535.775.800	-	APBD	Disdikpora	126.906	126.906			155.793.941.169	-	APBD	Disdikpora
	SD							69.159.846.000								107.473.988.000			
1	Kemampuan literasi	Nilai	84			86	86							86	86				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	78			86	86							86	86				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76			78	78							78	78				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76			75	75							75	75				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58			62	62							62	62				
	SMP							37.991.527.000								48.319.953.169			
1	Kemampuan literasi	Nilai	87			89	89							89	89				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	66			84	84							84	84				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	71			73	73							73	73				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75			72	72							72	72				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59			59	59							59	59				

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
3	Pendidikan Kesetaraan	warga negara	2.858	2.074	1.873			4.375.929.800	-	APBN dan APBD	Disdikpora	2.074	2.074			71.225.810.000	-	APBN dan APBD	Disdikpora
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	83			66	66							66	66				

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	warga negara	27.796	27.796			22.904.430.000	-	APBD	Disdikpora	27.796				23.090.430.000	-	APBD	Disdikpora
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase			82	82							83	83				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase			93	93							94	94				
2	Pendidikan Dasar	warga negara	126.906	126.906			157.844.741.765	-	APBD	Disdikpora	126.906	126.906			157.993.214.770	-	APBD	Disdikpora
	SD						103.777.912.209								102.216.397.714			
1	Kemampuan literasi	Nilai			87	87							88	88				
2	Kemampuan numerasi	Nilai			87	87							88	88				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai			79	79							80	80				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai			76	76							77	77				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai			63	63							64	64				
	SMP						54.066.829.556								55.776.817.056			
1	Kemampuan literasi	Nilai			90	90							91	91				
2	Kemampuan numerasi	Nilai			85	85							86	86				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai			74	74							75	75				

Handwritten signature/initials

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai			73	73							74	74				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai			60	60							61	61				
3	Pendidikan Kesetaraan	warga negara	2.281	2.281			69.159.810.000	-	APBD	Disdikpora	2.281	2.281			69.528.610.000	-	APBN dan APBD	Disdikpora
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase			67	67							68	68				

No	Jenis Layanan SPM	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	warga negara	27.796	27.796			23.295.030.000	-	APBD	Disdikpora
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase			84	84				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase			95	95				
2	Pendidikan Dasar	warga negara	126.906	126.906			157.633.388.367	-	APBD	Disdikpora
	SD						100.039.909.436			
1	Kemampuan literasi	Nilai			89	89				
2	Kemampuan numerasi	Nilai			89	89				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai			81	81				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai			78	78				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai			65	65				
	SMP						57.593.478.931			
1	Kemampuan literasi	Nilai			92	92				
2	Kemampuan numerasi	Nilai			87	87				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai			76	76				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai			75	75				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai			62	62				
3	Pendidikan Kesetaraan	warga negara	2.281	2.281			69.932.340.000	-	APBD	Disdikpora
	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase			69	69				

5.2.2. Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	warga negara	14.811	13.509	13.509			2.172.289.500	-	DAU Kesehatan dan DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	13.972	13.972			380.000.000	-		Dinas Kesehatan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14.811			13.509	13.509							13,972	13,972				
11	Gel USG, untuk Dinas Kesehatan yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	987			987	987							13,972	13,972				

[Handwritten signature]

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	16			16	16							16	16				
13	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	1.913			824	824							824	824				
14	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	824			1.913	1.913							1.913	1.913				
15	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
16	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	67			67	67							67	67				
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	14.811			6.754	6.754							6.754	6.754				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	warga negara	14.138	12.894	12.894			133.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	13.261	13.261			300.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Formulir partograf	Formulir	14.138			12.894	12.894							13,261	13,261				
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	14.138			12.894	12.894							13,261	13,261				
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	14.138			12.894	12.894							13,261	13,261				
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	14.138			12.894	12.894							13,261	13,261				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	16			16	16							16	16				
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
8	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	67			67	67							67	67				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	warga negara	12.213	12.280	12.280			123.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	13.067	13.067			320.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
3	Salap/tetes mata antibiotik	Orang	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12.213			12.280	12.280							13,076	13,076				
8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	16			16	16							16	16				
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	25			25	25							25	25				
13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	67			67	67							67	67				
14	Kader Kesehatan	Orang	4.180			4.180	4.180							4.180	4.180				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	warga negara	48.809	61.400	61.400			714.000.000	-	DAU Kesehatan	Dinas Kesehatan	63.004	63.004			275.000.000	-	DAU Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	48.809			61.400	61.400							63,004	63,004				
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	20			20	20							20	20				
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	20			20	20							20	20				
16	Tenaga medis: Dokter	Orang	372			372	372							372	372				
17	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
18	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
19	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	67			67	67							67	67				
20	Guru PAUD	Orang	80			100	100							100	100				
21	Kader kesehatan	Orang	3.000			2.000	2.000							2.000	2.000				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	warga negara	126.115	172.598	172.598			634.400.000	-	DAU Kesehatan	Dinas Kesehatan	183.805	183.805			200.000.000	-	DAU Kesehatan dan	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										dan DAK Non Fisik								DAK Non Fisik	
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/ Buku	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Dinas Kesehatan)	Formulir	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Dinas Kesehatan dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	20			172.598	172.598							183,805	183,805				
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Dinas Kesehatan dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	20			172.598	172.598							183,805	183,805				
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	126.115			172.598	172.598							183,805	183,805				
11	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	60			60	60							60	60				
12	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
13	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
14	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	67			67	67							67	67				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
16	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	65			65	65							65	65				
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	80			80	80							80	80				
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/ dokter kecil/peer counselor	Orang	4.180			4.180	4.180							4.180	4.180				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	warga negara	573.808	572.447	572.447			421.484.000	-	APBD, DAU Kesehatan, dan DAU	Dinas Kesehatan	290.694	290.694			220.000.000	-	APBD, DAU Kesehatan, dan DAU	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	573.808			572.447	572.447							290,694	290,694				
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	52			52	52							52	52				
3	Alat: Tensimeter	Unit	37			37	37							37	37				
4	Alat: Glukometer	Unit	81			81	81							81	81				
5	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit	27			27	27							27	27				
6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	573.808			572.447	572.447							290,694	290,694				
7	Alat: KIT IVA Tes	Unit	573.808			572.447	572.447							290,694	290,694				
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	27			27	27							27	27				
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	20			20	20							20	20				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPOK)	Dokumen	573.808			572.447	572.447							290,694	290,694				
11	Alat Pelayanan KB	Unit	60			120	120							120	120				
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	-			40	40							40	40				
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	-			40	40							40	40				
	c. Vasektomi set	Unit	-			40	40							40	40				
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	573.808			572.447	572.447							290,694	290,694				
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	573.808			572.447	572.447							290,694	290,694				
14	Tenaga medis: Dokter	Orang	372			372	372							372	372				
15	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
16	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	67			67	67							67	67				
18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	65			65	65							65	65				
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	22			22	22							22	22				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	warga negara	97.968	103.891	103.891			36.836.500	-	APBD, DAK Non Fisik Dinas, dan DAU	Dinas Kesehatan	69.213	69.213			185.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	20			40	40							40	40				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	97.968			103.891	103.891							69,213	69,213				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	20			40	40							40	40				
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	97.968			103.891	103.891							69,213	69,213				
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	20			103.891	103.891							69,213	69,213				
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	97.968			103.891	103.891							69,213	69,213				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	97.968			103.891	103.891							69,213	69,213				
8	Tenaga medis: Dokter	Orang	372			372	372							372	372				
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	67			67	67							67	67				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	65			65	65							65	65				
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	80			80	80							80	80				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	warga negara	232.426	232.426	232.426			204.330.000	-	APBD dan DAU Kesehatan	Dinas Kesehatan	126.420	126.420			220.000.000	-	APBD, DAU	Dinas Kesehatan
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	232.426			232.426	232.426							126,420	126,420				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Obat Hipertensi	Paket	232.426			232.426	232.426							126,420	126,420				
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	37			37	37							37	37				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	232.426			232.426	232.426							126,42	126,42				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	19			232.426	232.426							126,42	126,42				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	372			372	372							372	372				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	67			87	87							87	87				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27			27	27							27	27				
11	Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	62			62	62							62	62				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	warga negara	18.033	18.032	18.032			23.020.000	-	DAU Kesehatan	Dinas Kesehatan	17.382	17.382			135.000.000	-	DAU	Dinas Kesehatan
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	18.033			18.032	18.032							17,382	17,382				
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	27			18.032	18.032							17,382	17,382				
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	18.033			18.032	18.032							17,382	17,382				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan)	Formulir	18.033			18.032	18.032							17,382	17,382				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	18.033			18.032	18.032					-	-	17,382	17,382				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang	372			372	372							372	372				
7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	65			65	65							65	65				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	67			67	67							67	67				
12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	167			167	167							167	167				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	warga negara	2.182	2.173	2.173			165.359.000	-	APBD dan DAK Non Fisik Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.658	1.658			140.000.000	-	APBD dan DAK Non Fisik Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Dinas Kesehatan atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	2.182			2.173	2.173							1,658	1,658				
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	2.182			2.173	2.173							1,658	1,658				
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2.182			2.173	2.173							1,658	1,658				
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	2.182			2.173	2.173							1,658	1,658				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	2.182			2.173	2.173							1,658	1,658				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang	372			372	372							372	372				
7	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	4			4	4							4	4				
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	20			1	1							1	1				
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	1			20	20							20	20				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	warga negara	12.867	12.869	12.869			494.125.600	-	APBD dan DAK Non	Dinas Kesehatan	10.819	10.819			252.000.000	-	APBD dan	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										Fisik Dinas Kesehatan								DAK Non Fisik Dinas Kesehatan	
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
2	Reagen Zn TB	Kit	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
5	Katrid tes cepat molekuler	Tes	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
8	Tuberkulin	Vial	12.867			12.869	12.869							10,819	10,819				
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	18			18	18							18	18				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	499			499	499							499	499				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	62			62	62							62	62				
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	167			167	167							167	167				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	64			64	64							64	64				
15	Kader Kesehatan	Orang	4.180			4.180	4.180							4.180	4.180				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	warga negara	16.547	16.876	16.876			245.195.800	-	APBD, DAU Kesehatan, dan DAU	Dinas Kesehatan	15.900	15.900			30.000.000	-	APBD, DAU Kesehatan, dan DAU	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16.547			16.876	16.876							15,900	15,900				
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	16.547			16.876	16.876							15,900	15,900				
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	16.547			16.876	16.876							15,900	15,900				
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	16.547			16.876	16.876							15,900	15,900				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	5			5	5							5	5				
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	824			824	824							824	824				
7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.913			1.913	1.913							1.913	1.913				
8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	167			167	167							167	167				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	65			65	65							65	65				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	22			22	22							22	22				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	warga negara	12.448	12.448			440.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	12.372	12.372			580.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			12.448	12.448							12.372	12.372				
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet			12.448	12.448							12.372	12.372				
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			12.448	12.448							12.372	12.372				
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			12.448	12.448							12.372	12.372				
11	Gel USG, untuk Dinas Kesehatan yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol			12.448	12.448							12.372	12.372				
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			16	16							16	16				
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			824	824							824	824				
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang			67	67							67	67				
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (<i>setu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga</i>)	Orang			6.754	6.754							6.754	6.754				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	warga negara	11.884	11.884			410.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	11.407	11.407			425.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Formulir partograf	Formulir			11.884	11.884							11.407	11.407				
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			11.884	11.884							11.407	11.407				
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (<i>terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan</i>)	Buku			11.884	11.884							11.407	11.407				
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			11.884	11.884							11.407	11.407				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			16	16							16	16				
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
8	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang			67	67							67	67				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	warga negara	11.317	11.317			420.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	10.862	10.862			520.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin			11.317	11.317							10.862	10.862				
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			11.317	11.317							10.862	10.862				
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			11.317	11.317							10.862	10.862				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir			11.317	11.317							10.862	10.862				
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir			11.317	11.317							10.862	10.862				
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			11.317	11.317							10.862	10.862				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			11.317	11.317							10.862	10.862				
8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			16	16							16	16				
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang			25	25							25	25				
13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67							67	67				
14	Kader Kesehatan	Orang			4.180	4.180							4.180	4.180				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	warga negara	45.268	45.268			375.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	43.448	43.448			475.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir			45.268	45.268							43.448	43.448				
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir			45.268	45.268							43.448	43.448				
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			45.268	45.268							43.448	43.448				
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul			45.268	45.268							43.448	43.448				
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul			45.268	45.268							43.448	43.448				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin			45.268	45.268							43.448	43.448				
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			45.268	45.268							43.448	43.448				
14	Peralatan Anafilaktik	Paket			20	20							20	20				
15	Formula terapi gizi buruk	Paket			20	20							20	20				
16	Tenaga medis : Dokter	Orang			372	372							372	372				
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			824	824							824	824				
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			67	67							67	67				
20	Guru PAUD	Orang			100	100							100	100				
21	Kader kesehatan	Orang			2.000	2.000							2.000	2.000				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	warga negara	126.779	126.779			200.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	126.893	126.893			200.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/ Buku			126.779	126.779							126.893	126.893				
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku			126.779	126.779							126.893	126.893				
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen			126.779	126.779							126.893	126.893				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir			126.779	126.779							126.893	126.893				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Dinas Kesehatan)	Formulir			126.779	126.779							126.893	126.893				
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet			126.779	126.779							126.893	126.893				
7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Dinas Kesehatan dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat			126.779	126.779							126.893	126.893				
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Dinas Kesehatan dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip			126.779	126.779							126.893	126.893				
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			126.779	126.779							126.893	126.893				
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh	Vaksin			126.779	126.779							126.893	126.893				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<i>sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)</i>																	
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang			60	60							60	60				
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			824	824							824	824				
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang			67	67							67	67				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65							65	65				
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang			80	80							80	80				
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/ dokter kecil/peer counselor	Orang			4.180	4.180							4.180	4.180				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	warga negara	577.014	577.014			225.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	577.014	577.014			230.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			577.014	577.014							577.014	577.014				
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			577.014	577.014							577.014	577.014				
3	Alat: Tensimeter	Unit			37	37							37	37				
4	Alat: Glukometer	Unit			81	81							81	81				
5	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit			27	27							27	27				
6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			577.014	577.014							577.014	577.014				
7	Alat: KIT IVA Tes	Unit			577.014	577.014							577.014	577.014				
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			577.014	577.014							577.014	577.014				
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit			20	20							20	20				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPOK)	Dokumen			577.014	577.014							577.014	577.014				
11	Alat Pelayanan KB	Unit			120	120							120	120				
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			40	40							40	40				
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit			40	40							40	40				
	c. Vasektomi set	Unit			40	40							40	40				
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			577.014	577.014					-	-	577.014	577.014				
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			577.014	577.014							577.014	577.014				
14	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372							372	372				
15	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
16	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67							67	67				
18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65							65	65				
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			22	22							22	22				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	warga negara	111.266	111.266			185.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	113.493	113.493			195.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			40	40							40	40				
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			111.266	111.266							113.493	113.493				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			40	40							40	40				
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			111.266	111.266							113.493	113.493				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			111.266	111.266							113.493	113.493				
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			111.266	111.266							113.493	113.493				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			111.266	111.266							113.493	113.493				
8	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372							372	372				
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67							67	67				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65							65	65				
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			80	80							80	80				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	warga negara	189.578	189.578			210.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	189.578	189.578			210.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket			189.578	189.578							189.578	189.578				
2	Obat Hipertensi	Paket			189.578	189.578							189.578	189.578				
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			37	37							37	37				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen			189.578	189.578							189.578	189.578				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket			189.578	189.578							189.578	189.578				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372							372	372				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			87	87							87	87				
10	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			27	27							27	27				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			62	62							62	62				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	warga negara	22.383	22.383			235.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	22.383	22.383			335.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat Diabetes Melitus	Paket			22.383	22.383							22.383	22.383				
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			22.383	22.383							22.383	22.383				
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			22.383	22.383							22.383	22.383				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan)	Formulir			22.383	22.383							22.383	22.383				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman			22.383	22.383							22.383	22.383				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372							372	372				
7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65							65	65				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67							67	67				
12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			167	167							167	167				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	warga negara	2.171	2.171			140.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	2.171	2.171			140.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Dinas Kesehatan atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku			2.171	2.171							2.171	2.171				
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			2.171	2.171							2.171	2.171				
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir			2.171	2.171							2.171	2.171				
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir			2.171	2.171							2.171	2.171				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media			2.171	2.171							2.171	2.171				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372							372	372				
7	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			4	4							4	4				
8	Tenaga profesional lainnya	Orang			1	1							1	1				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang			20	20							20	20				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	warga negara	9.499	9.499			555.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	8.410	8.410			655.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			9.499	9.499							8.410	8.410				
2	Reagen Zn TB	Kit			9.499	9.499							8.410	8.410				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket			9.499	9.499							8.410	8.410				
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			9.499	9.499							8.410	8.410				
5	Katrid tes cepat molekuler	Tes			9.499	9.499							8.410	8.410				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			9.499	9.499							8.410	8.410				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			9.499	9.499							8.410	8.410				
8	Tuberkulin	Vial			9.499	9.499							8.410	8.410				
9	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			18	18							18	18				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499							499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			62	62							62	62				
13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			167	167							167	167				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang			64	64							64	64				
15	Kader Kesehatan	Orang			4.180	4.180							4.180	4.180				
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	warga negara	15.475	15.475			230.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan	15.265	15.265			230.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			15.475	15.475							15.265	15.265				
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes			15.475	15.475							15.265	15.265				
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			15.475	15.475							15.265	15.265				
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			15.475	15.475							15.265	15.265				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			5	5							5	5				
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824							824	824				
7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913							1.913	1.913				
8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			167	167							167	167				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			65	65							65	65				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			22	22							22	22				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	warga negara	11.878	11.878			582.737.500	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			11.878	11.878				
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet			11.878	11.878				
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket			11.878	11.878				
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket			11.878	11.878				
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			11.878	11.878				
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket			11.878	11.878				
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket			11.878	11.878				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			11.878	11.878				
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			11.878	11.878				
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			11.878	11.878				
11	Gel USG, untuk Dinas Kesehatan yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol			11.878	11.878				
12	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			16	16				
13	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
14	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
15	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			499	499				
16	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang			67	67				
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang			6.754	6.754				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	warga negara	10.948	10.948			620.499.500	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Formulir partograf	Formulir			10.948	10.948				
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			10.948	10.948				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (<i>terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan</i>)	Buku			10.948	10.948				
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			10.948	10.948				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang			16	16				
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
8	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang			499	499				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang			67	67				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	warga negara	10.428	10.428			520.500.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin			10.428	10.428				
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			10.428	10.428				
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			10.428	10.428				
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir			10.428	10.428				
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir			10.428	10.428				
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			10.428	10.428				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			10.428	10.428				
8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			16	16				
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang			25	25				
13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67				
14	Kader Kesehatan	Orang			4.180	4.180				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	warga negara	41.712	41.712			575.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Kuis/Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir			41.712	41.712				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir			41.712	41.712				
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			41.712	41.712				
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul			41.712	41.712				
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul			41.712	41.712				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			41.712	41.712				
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin			41.712	41.712				
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			41.712	41.712	-	-		
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT – HB – Hib	Vaksin			41.712	41.712				
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	Vaksin			41.712	41.712				
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT – HB – Hib	Vaksin			41.712	41.712				
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak – Rubella	Vaksin			41.712	41.712				
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			41.712	41.712				
14	Peralatan Anafilaktik	Paket			20	20				
15	Formula terapi gizi buruk	Paket			20	20				
16	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372				
17	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
18	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
19	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67				
20	Guru PAUD	Orang			100	100				
21	Kader kesehatan	Orang			2.000	2.000				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	warga negara	127.007	127.007			200.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/ Buku			127.007	127.007				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku			127.007	127.007				
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen			127.007	127.007				
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir			127.007	127.007				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Dinas Kesehatan)	Formulir			127.007	127.007	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet			127.007	127.007				
7	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Dinas Kesehatan dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat			127.007	127.007				
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Dinas Kesehatan dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip			127.007	127.007				
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket			127.007	127.007				
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin			127.007	127.007				
11	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang			60	60				
12	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
13	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
14	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499				
16	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65				
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang			80	80				
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/ dokter kecil/peer counselor	Orang			4.180	4.180				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	warga negara	577.014	577.014			230.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			577.014	577.014				
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket			52	52				
3	Alat: Tensimeter	Unit			37	37				
4	Alat: Glukometer	Unit			81	81				
5	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit			27	27				
6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket			577.014	577.014				
7	Alat: KIT IVA Tes	Unit			577.014	577.014				
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit			27	27				
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit			20	20				
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen			577.014	577.014				
11	Alat Pelayanan KB	Unit			120	120				
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit			40	40				
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit			40	40				
	c. Vasektomi set	Unit			40	40				
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			577.014	577.014				
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			577.014	577.014				
14	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372				
15	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
16	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67				
18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65				
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			22	22				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	warga negara	115.762	115.762			195.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket			40	40				
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket			115.762	115.762				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket			40	40				
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket			115.762	115.762				
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket			115.762	115.762				
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku			115.762	115.762				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			115.762	115.762				
8	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372				
9	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65				
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			80	80				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	warga negara	189.578	189.578			210.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket			189.578	189.578				
2	Obat Hipertensi	Paket			189.578	189.578				
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit			37	37				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen			189.578	189.578				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket			189.578	189.578				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372				
7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			87	87				
10	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang			27	27				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			62	62				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	warga negara	22.383	22.383			335.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat Diabetes Melitus	Paket			22.383	22.383				
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit			22.383	22.383				
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit			22.383	22.383				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan)	Formulir			22.383	22.383				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman			22.383	22.383				
6	Tenaga medis: Dokter	Orang			372	372				
7	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
8	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499				
10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			65	65				
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang			67	67				
12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			167	167				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	warga negara	2.171	2.171			140.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Dinas Kesehatan atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku			2.171	2.171				
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket			2.171	2.171				
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir			2.171	2.171				
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir			2.171	2.171				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media			2.171	2.171				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang			372	372				
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang			4	4				
8	Tenaga profesional lainnya	Orang			1	1				
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang			20	20				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	warga negara	7.582	7.582			655.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			7.582	7.582				
2	Reagen Zn TB	Kit			7.582	7.582				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket			7.582	7.582				
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			7.582	7.582				
5	Katrid tes cepat molekuler	Tes			7.582	7.582				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			7.582	7.582				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			7.582	7.582				
8	Tuberkulin	Vial			7.582	7.582				
9	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang			18	18				
10	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang			499	499				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			62	62				
13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			167	167				
14	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang			64	64				
15	Kader Kesehatan	Orang			4.180	4.180				
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	warga negara	14.548	14.548			230.000.000	-	APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket			14.548	14.548				
2	Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDT) pertama	Tes			14.548	14.548				
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			14.548	14.548				
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			14.548	14.548				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			5	5				
6	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang			824	824				
7	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang			1.913	1.913				
8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			167	167				
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			65	65				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang			22	22				

5.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	6.408	874.796	862.462			615.000.000	-	APBD	Dinas PUPR	874.796	874.796			423.108.000	-	APBD	Dinas PUPR
	Jaringan Perpipaan																		
	Kuantitas SPAM																		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1602			89.674	82.126							89.674	89.674				
	Kualitas SPAM																		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1602			89.674	82.126							89.674	89.674				
	Bukan Jaringan Perpipaan																		
	Kuantitas SPAM																		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0			0	0							0	0				
	Kualitas SPAM																		
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna,	Rumah Tangga	0			0	0							0	0				

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.																		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	2.216	874.796	861.837			2.533.054.800	-	APBD	Dinas PUPR	874.796	874.796			1.102.628.000	-	APBD	Dinas PUPR
	SPALD Kabupaten/Kota																		
	KUANTITAS SPALD																		
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	554			218.716	215.476							218.716	218.716				
	KUALITAS SPALD																		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)																		
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	554			218.716	215.476							218.716	218.716				
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)																		
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan $\geq$ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3	Rumah Tangga				12.709	673							12.709	12.709				

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<i>tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota</i>																		
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga				53.787	52.798							53.787	53.787				

[Handwritten signature]

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	20
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	874.796	874.796			2.419.350.085		APBD	Dinas PUPR	874.796	874.796			2.427.251.156		APBD	Dinas PUPR
	Jaringan Perpipaan																	
	Kuantitas SPAM																	
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga			85.299	85.299							86.393	86.393				
	Kualitas SPAM																	
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga			85.299	85.299							86.393	86.393				
	Bukan Jaringan Perpipaan																	
	Kuantitas SPAM																	
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga			0	0							0	0				
	Kualitas SPAM																	
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga			0	0							0	0				

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	20
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	874.796	874.796			3.092.834.798,00	-	APBD	Dinas PUPR	874.796	874.796			3.113.425.149,00	-	APBD	Dinas PUPR
	SPALD Kabupaten/Kota																	
	KUANTITAS SPALD																	
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			218.716	218.716							218.716	218.716				
	KUALITAS SPALD																	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)																	
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga			41.140	41.140							52.295	41.140				
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)																	
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3	Rumah Tangga			12.709	12.709							12.709	12.709				

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	20
	<i>tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota</i>																	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			53.787	53.787							53.787	53.787				

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	874.796	874.796			2.420.047.214	-	APBD	Dinas PUPR
	Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga			87.486	87.486				
	Kualitas SPAM									
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga			87.486	87.486				
	Bukan Jaringan Perpipaan									
	Kuantitas SPAM									

No	Jenis Layanan SPM/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga								
	Kualitas SPAM									
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga								
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	874.796	874.796			3.092.834.798,00	-	APBD	Dinas PUPR
	SPALD Kabupaten/Kota									
	KUANTITAS SPALD									
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			218.716	218.716				
	KUALITAS SPALD									
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)									
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga			63.428	63.428				
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)									
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga			12.709	12.709				
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			53.787	53.787				

5.2.4. Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat																		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	972	264	264				-	Swadaya	Masyarakat	1.000	1.000				-	APBD Kab & swadaya	Masyarakat & DPKPLH
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	243			66	66							250	250	15.000.000			
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0			0	0							0	0				
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0			0	0							0	0				
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah				0	0							0	0				
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	-			-	-							-	-				
	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen	-			-	-							-	-				
	Ada Relokasi Program Pemerintah																		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	12	-	-			-	-			4	4				-		DPKPLH

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		1																
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah				-	-			-	-			-	-	-		-	-
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah				-	-			-	-			-	-	-		-	-
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah				-	-			-	-			-	-	-		-	-
	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah												1	1	2.400.000		APBD Kab	
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	-			1	1	2365900		APBD Kab	Dinas PKPLH			-	-	-	-	-	-

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat																	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.000	1.000				-	APBD Kab & swadaya	Masyarakat & DPKPLH	1.000	1.000				-	APBD Kab & swadaya	Masyarakat & DPKPLH
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			250	250	15.000.000						250	250	15.000.000			
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			-	-							-	-				
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah			-	-							-	-	-			
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah			-	-							-	-				
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																	
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan			-	-							-	-				
	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen			-	-							-	-				
	Ada Relokasi Program Pemerintah																	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4	4			2.400.000	-		DPKPLH	4	4			2.400.000	-		DPKPLH
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah			-	-							-	-				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah			-	-							-	-				
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-							-	-				
	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah			1	1	2.400.000		APBD Kab				1	1	2.400.000		APBD Kab	DPKPLH
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																	
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan			-	-							-	-				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat									
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.000	1.000				-	APBD Kab & swadaya	Masyarakat & DPKPLH
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			250	250	15000000			
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah			-	-			-	-
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah			-	-			-	-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah			-	-			-	-
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)									
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan								
	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen								
	Ada Relokasi Program Pemerintah									
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	4	4			2.400.000	-	APBD Kab & swadaya	DPKPLH
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan				-	-				
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah			-	-				
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah			-	-				
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-				
	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah			-	-				
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah									
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan			1	1	2.400.000		APBD Kab	DPKPLH

5.2.5. Bidang Trantibum Linmas

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM													0	0				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten	orang	212	400	400			1.260.742.500	-	APBD dan DBHCHT	SATPOL PP	400	400			1.012.815.800	-	APBD dan DBHCHT	SATPOL PP
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	unit	3			109	109							109	109				
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	dokumen	14			12	12							12	12				

Handwritten signature or mark.

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	139			18	18							37	37				
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			1	1							1	1				
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	0			0	0							0	0				
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	0			0	0							0	0				

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN																		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	orang	59.174	59.174	59.174			150.000.000		APBD	BPBD	59.714	59.174			170.000.000	-	APBD	BPBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)																		
	Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)																		
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				1	1							1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				1	1							1	1				
	Ada: Baru dibuat Tahun 2025																		
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				2	2												
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen				3	3							2	2				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen				12	12							0	0				
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang				0	0							8	8				
	Tidak Ada																		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana																		

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana																		
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar				50	50							1185	1185				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa				100	100							11	11				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang				10	10							45	45				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				500	500							8	8				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia																		
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media				3	3							2	2				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah				3	3							4	4				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit				7	7							4	4				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang				30000	30000							2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik																		
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah				120	120							0	0				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah				5	5							0	0				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5							1	1				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2							0	0				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2							1	1				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	warga negara	59.174	59.174	59.174			1.468.000.000	-	APBD	BPBD	59.714	59.714			1.520.000.000	-	APBD	BPBD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana																		
	Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)																		
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkada					1	1							1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada					1	1							1	1				
	Ada: Baru dibuat Tahun 2025																		
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkada	dokumen				3	3							1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen				2	2							1	1				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen				12	12							0	0				
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang				0	0							8	8				
	Tidak Ada																		
	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)																		
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				2	2							1	1				

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen				4	4							2	2				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang				12	12							4	4				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							8	8				
	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi																		
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur																		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				50	50							100	100				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				4	4							16	16				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah				1	1							100	100				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket				1	1							1	1				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang				4	4							16	16				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							8	8				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara																		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				492	492							150	150				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				16	16							150	150				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah				4	4							150	150				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang				16	16							20	20				

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang				492	492							8	8				
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)																		
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				1	1							1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket				5	5							1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							8	8				
	Gladi Lapangan																		
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				1	1							1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				1	1							1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang				550	550							20	20				
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari				365	365							365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan				4	4							12	12				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang				1	1							1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang				3	3							1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang				8	8							10	10				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana																		
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit				3	3							4	4				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit				3	3							1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit				1	1							1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit				3	3							1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast																		
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	58,09			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket				1	1							1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat																		
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket				1	1							70	70				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket				20	20							0	0				
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																		
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket				50	50							1	1				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket				200	200							0	0				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket				100	100							0	0				
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit				50	50							0	0				
	Terjadi Bencana - Lampirkan SK																		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	59.174	30.000	30.000			277.000.000	-	APBD	BPBD	30.000	30.000			292.000.000	-	APBD	BPBD
	Kejadian Bencana																		
	Respon Cepat Darurat Bencana																		
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen				1	1							1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang				50	50							50	50				
	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana																		
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				20	20							20	20				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit				50	50							50	50				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit				50	50							50	50				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				3	3							3	3				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				3	3							3	3				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							50	50				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5							5	5				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang				10	10							10	10				
	Status Tanggap Darurat																		
	Respon Cepat Darurat Bencana																		
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen				1	1							1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen				1	1							1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang				50	50							50	50				
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket				50	50							50	50				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				0	0							1	1				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				5	5							5	5				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				1	1							1	1				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				1	1							1	1				
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket				20	20							20	20				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit				50	50							50	50				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit				50	50							50	50				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				3	3							3	3				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				3	3							3	3				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang				50	50							50	50				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5							5	5				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang				10	10							10	10				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM																		
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR																		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	19	76	76			69.000.000	-	APBD	SATPOL PP	76	76			56.026.700	-	APBD	SATPOL PP
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (<i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</i>)	layanan				76	76							76	76				
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (<i>seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.</i>)	dokumen				1	1							1	1				
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (<i>pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.</i>), penyelamatan dan evakuasi (<i>helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.</i>)	unit				285	285							285	285				
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (<i>jumlah aparat SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I</i>)	orang				1	1							1	1				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				76	76							76	76				
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				0	0							0	0				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM																	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten	orang	400	400			1.010.037.466	-	APBD dan DBHCHT	SATPOL PP	400	400			1.015.878.953	-	APBD dan DBHCHT	SATPOL PP
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit			109	109							109	109				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen			12	12							12	12				
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			38	38							39	39				
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen			1	1							1	1				
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang			0	0							0	0				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang			0	0							0	0				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN																	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	orang	59,714	59,174			280.000.000	-	APBD	BPBD	59,714	59,174			190.000.000	-	APBD	BPBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)																	
	Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)																	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1							1	1				
	Ada: Baru dibuat Tahun 2025																	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			2	2							2	2				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen			3	3							3	3				
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Tidak Ada																	

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana																	
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana																	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar			1000	1000							1000	1000				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			10	10							10	10				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10							10	10				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia																	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			2	2							2	2				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			4	4							4	4				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			4	4							4	4				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2							2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik																	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0	0							0	0				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0	0							0	0				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1							1	1				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0	0							0	0				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1							1	1				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	warga negara	59.714	59.714			1.672.000.000	-	APBD	BPBD	59.714	59.714			1.624.000.000	-	APBD	BPBD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana																	
	Ada: Sudah Lama dibuat																	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada				1	1					-	-	1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada				1	1							1	1				
	Ada: Baru dibuat Tahun 2025																	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			1	1							1	1				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			2	2							2	2				
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Tidak Ada																	
	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)																	
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2	2							2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4							4	4				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi																	
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur																	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20							20	20				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			4	4							4	4				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			20	20							20	20				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1							1	1				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4							4	4				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara																	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20							20	20				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20							20	20				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			20	20							20	20				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4							4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana																	

Handwritten signature/initials

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)																	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1							1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8							8	8				
	Gladi Lapang																	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1							1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			20	20							20	20				
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana																	
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365	365							365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			12	12							12	12				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1	1							1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1							1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10							10	10				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana																	

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25				29	30	31	32	33			
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			4	4							4	4				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1							1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1							1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1							1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast																	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1							1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat																	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			70	70							70	70				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0	0							0	0				
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana																	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1							1	1				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0	0							0	0				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0	0							0	0				
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0	0							0	0				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Terjadi Bencana - Lampirkan SK																	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	30.000				307.000.000	-	APBD	BPBD	30.000				322.000.000	-	APBD	BPBD
	<i>Kejadian Bencana</i>																	
	<i>Respon Cepat Darurat Bencana</i>																	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			1	1							1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			50	50							50	50				
	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</i>																	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20							20	20				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			50	50							50	50				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			50	50							50	50				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3							3	3				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3							3	3				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			50	50							50	50				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5							5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<i>h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	orang			10	10							10	10				
	Status Tanggap Darurat																	
	Respon Cepat Darurat Bencana																	
	<i>a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	dokumen			1	1							1	1				
	<i>b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	dokumen			1	1							1	1				
	<i>c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)</i>	orang			50	50							50	50				
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
	<i>a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket			50	50							50	50				
	<i>b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen			1	1							1	1				
	<i>c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen			5	5							5	5				
	<i>d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen			1	1							1	1				
	<i>e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)</i>	dokumen			1	1							1	1				
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																	
	<i>a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)</i>	paket			20	20							20	20				
	<i>b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)</i>	unit			50	50							50	50				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			50	50							50	50				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3							3	3				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3							3	3				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			50	50							50	50				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5							5	5				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10							10	10				
	Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM																	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR																	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	76	76			10.971.529.088		APBD	SATPOL PP	76	76			1.040.575.324		APBD	SATPOL PP
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			76	76				SATPOL PP			76	76				SATPOL PP

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			1	1				SATPOL PP			1	1				SATPOL PP
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			292	292				SATPOL PP			306	306				SATPOL PP
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			2	2				SATPOL PP			3	3				SATPOL PP
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			76	76				SATPOL PP			76	76				SATPOL PP
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			0	0				SATPOL PP			0	0				SATPOL PP

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM									
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten	<i>orang</i>	600	600			5.701.552.874	-	APBD dan DBHCHT	SATPOL PP
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>			110	110				
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>			12	12				
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	<i>orang</i>			40	40				
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>			1	1				
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				0	0				
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	<i>orang</i>			0	0				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41			
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang								
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN									
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	orang	59.714	59.714			300.000.000	-	APBD	BPBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)									
	Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	Ada: Baru dibuat Tahun 2025									
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen			3	3				
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				
	Tidak Ada									
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana									
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana									
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar			1000	1000				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa			10	10				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia									
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			2	2				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			4	4				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			4	4				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			2	2				
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0	0				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			0	0				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			0	0				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	warga negara	59.714	59.714			1.726.000.000	-	APBD	BPBD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana									
	Ada: Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)									
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara				1	1				
	Ada: Baru dibuat Tahun 2025									
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen			1	1				
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen			2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41			
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				
	Tidak Ada									
	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)									
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				
	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi									
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			4	4				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			20	20				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah			20	20				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang			4	4				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)									

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang			8	8				
	Gladi Lapang									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang			20	20				
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan			12	12				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang			1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			4	4				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket			70	70				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0	0				
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0	0				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket			0	0				
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			0	0				
	Terjadi Bencana - Lampirkan SK									
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	30.000				338.000.000	-	APBD	BPBD
	Kejadian Bencana									
	Respon Cepat Darurat Bencana									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			50	50				
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			20	20				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			50	50				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			50	50				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			50	50				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			10	10				
	Status Tanggap Darurat									
	Respon Cepat Darurat Bencana									
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			1	1				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			1	1				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			50	50				
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			50	50				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			5	5				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			20	20				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			50	50				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			50	50				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			3	3				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			3	3				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			50	50				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			10	10				
	Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM									
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR									
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	<i>orang</i>	76	76			3.561.621.400		APBD	SATPOL PP
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>			76	76				
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>			1	1				

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41			
3	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			308	308				
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			4	4				
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			76	76				
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			0	0				

5.2.6. Bidang Sosial

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	570	400	400			39.000.000	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	373	373			157.522.600	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan <i>layanan data</i> yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), <i>layanan pengaduan</i> merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	570			400	400							373	373				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat <i>layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</i> merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	224			400	400							373	373				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	29			294	294	24.000.000						200	200				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	50			50	50	15.000.000						50	50				
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	100			75	75							75	75				

K + B

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4			10	10							10	10				
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	16			10	10							10	10				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	120			10	10							10	10				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5			5	5							5	5				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2			5	5							3	3				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10			10	10							5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	5			5	5							2	2				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5			5	5							3	3				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	85	40	40			4.030.000	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	37	37			18.223.500	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	85			40	40							37	37				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	3			40	40							37	37				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	3			5	5	2.500.000						5	5				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5			5	5	1.530.000						5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3			2	2							2	2				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	3			5	5							5	5				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	46			5	5							5	5				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10			5	5							2	2				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	3			5	5							3	3				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	6			5	5							5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3			3	3							3	3				
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3			2	2							2	2				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	368	306	306			31.640.000	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	180	180			59.666.900	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	368			306	306							180	180				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	13			306	306							180	180				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	250			224	224	19.100.000						75	75				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	50			50	50	12.540.000						50	50				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	10			10	10							10	10				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3			20	20							20	20				
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	20			5	5							5	5				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	3			5	5							5	5				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			5	5							2	2				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2			5	5							3	3				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang	7			5	5							3	3				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3			2	2							2	2				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	4			3	3							3	3				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	100	92	92			6.530.000	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	68	68			22.446.800	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan <i>layanan data</i> yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); <i>layanan pengaduan</i> merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	100			92	92							68	68				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	8			92	92							68	68				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	15			10	10	5.000.000						5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	100			5	5	1.530.000						10	10				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3			20	20							20	20				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	52			10	10							10	10				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	8			10	10							10	10				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	8			5	5							2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	8			5	5							3	3				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	23			10	10							4	4				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	12			5	5							2	2				
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3			5	5							2	2				
	Ya Terjadi Bencana																		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	7.022	500	500			262.263.400	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	500	500			264.910.667	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	7022			500	500	180.560.400						500	500	180.000.000			
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3000			100	100	49.000.000						100	100	49.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed,	Orang	13			50	50							10	10	4.410.667			

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2024	Capaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)																		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	100			100	100	26.170.000						100	100	25.000.000			
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100			100	100	6.533.000				-	-	100	100	6.500.000			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)					-	-												

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	164	164			157.522.600	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	164	164			157.522.600	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan <i>layanan data</i> yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), <i>layanan pengaduan</i> merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			164	164							164	164				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat <i>layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</i> merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang			164	164							164	164				
3	Penyediaan permakanan <i>(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)</i>	Orang			50	50							50	50				
4	Penyediaan sandang <i>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)</i>	Orang			18	18							18	18				
5	Penyediaan alat bantu <i>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)</i>	Orang			70	70							70	70				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan <i>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>	Orang			5	5							5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			5	5							5	5				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			6	6							6	6				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			2	2							2	2				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			2	2							2	2				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang			3	3							3	3				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			2	2							2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			1	1							1	1				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	31	31			18.223.500	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	31	31			18.223.500	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			31	31							31	31				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang			31	31							31	31				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			10	10							10	10				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			2	2							2	2				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			2	2							2	2				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui	Orang			2	2							2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<i>media alat peraga dan alat tulis lainnya)</i> bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial																	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			3	3							3	3				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			1	1							1	1				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			1	1							1	1				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			5	5							5	5				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			4	4							4	4				
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			1	1							1	1				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	98	98			59.666.900	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	98	98			59.666.900	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan	Orang			98	98							98	98				

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<i>sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</i>																	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter	Orang			98	98							98	98				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/kelurahan lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			50	50							50	50				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			20	20							20	20				
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			5	5							5	5				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			2	2							2	2				
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym,	Orang			2	2							2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial																	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			3	3							3	3				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			1	1							1	1				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			1	1							1	1				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang			7	7							7	7				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			5	5							5	5				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			2	2							2	2				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	37	37			22.446.800	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	37	37			22.446.800	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,	Orang			37	37							37	37				

No	Jenis Layanan SPM Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<i>dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial</i>																	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang			37	37							37	37				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			10	10							10	10				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			10	10							10	10				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1	1							1	1				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			1	1							1	1				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan	Orang			3	3							3	3				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)																	
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang			1	1							1	1				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			1	1							1	1				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang			5	5							5	5				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			4	4							4	4				
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			1	1							1	1				
	Ya Terjadi Bencana																	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	500	500			264.910.667	-	APBD	DINSOS P3AP2KB	500	500			266.910.667	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			500		180.000.000						500		182.000.000			
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki,	Orang			100	100	49.000.000						100	100	49.000.000			

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Capaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	<i>pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>																	
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			10	10	4.410.667						10	10	4.410.667			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang			100	100	25.000.000						100	100	25.000.000			
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang			100	100	6.500.000						100	100	6.500.000			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%																	
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)																	

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	164	164			157.522.600	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			164	164				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang			164	164				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			50	50				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			18	18				
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			70	70				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			5	5				
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			5	5				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			6	6				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			2	2				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			2	2				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			3	3				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			2	2				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			1	1				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	31	31			18.223.500	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			31	31				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang			31	31				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			10	10				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			2	2				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			2	2				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			2	2				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			3	3				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			1	1				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			1	1				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			5	5				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			4	4				
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			1	1				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	98	98			59.666.900	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			98	98				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter	Orang			98	98				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			50	50				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			20	20				
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			5	5				
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			2	2				
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			2	2				
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			3	3				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			1	1				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			1	1				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	Orang			7	7				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			5	5				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			2	2				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	37	37			22.446.800	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			37	37				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat, layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang			37	37				
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang			10	10				
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang			10	10				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1	1				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			1	1				

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			3	3				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang			1	1				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang			1	1				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang			5	5				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			4	4				
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			1	1				
	Ya Terjadi Bencana									
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	500	500			266.910.667	-	APBD	DINSOS P3AP2KB
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			500	500	182.000.000			
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			100	100	49.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, velitbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			10	10	4.410.667			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang			100	100	25.000.000			

No	Jenis Layanan SPM/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			Jumlah Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			37	38	39	40	41	42	43	44
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang			100	100	6.500.000			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%									
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub Kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)									

5.3. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD Perangkat Daerah, RENSTRA Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Dokumen yang sistematis ini dimaksudkan agar antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Jika satu sub sistem perencanaan berubah maka yang lain akan mengikuti perubahan tersebut, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD-SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD-SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada RPJMD dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 6. Integrasi RAD-SPM ke dalam penganggaran Daerah.

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah), dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan Daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di Daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD; dan
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB VI

MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

6.1. Evaluasi Penerapan SPM

Pengawasan dan pembinaan penerapan SPM dilakukan secara vertikal seperti halnya koordinasi penerapan SPM. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota. Bupati/Wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten pada Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendanaan, pembinaan, dan pengawasan Penerapan SPM bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah Program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika Program tersebut telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan) sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis Program yang dibuat dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Daerah, indikator yang digunakan adalah indikator SPM di masing-masing urusan, dengan menghitung presentase antara capaian dan target yang telah ditentukan.

6.2. Pelaporan Penerapan SPM

Mekanisme pelaporan pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM tercantum dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Selain materi muatan, laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 24 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga menyebutkan bahwa laporan Penerapan SPM disampaikan oleh gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan Penerapan SPM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah kabupaten melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan secara triwulan diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun sistematika pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB III PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan diisi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses tahapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan, dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP.

BAB VII PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan Pelayanan Dasar 6 (enam) bidang SPM yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang tramtibum linmas, dan bidang sosial. Dalam rangka implementasi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam penerapan SPM. Kendala utama di dalam penerapan SPM di Daerah adalah ketentuan nomenklatur Program/Kegiatan/SubKegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM dalam sistem penganggaran masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>) sehingga akan berpotensi terjadi kekeliruan dalam input data anggaran dan realisasi. Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

6.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dicantumkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip ketepatan sasaran yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Badan perencanaan pembangunan daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibandingkan dengan Program dan Kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

4. Anggaran pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan transfer daerah maupun *Corporate Social Responsibility* serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non-Government Organization* (NGO) yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
7. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
8. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran.
9. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal.

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS